

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan UMKM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha UMKM. Bank memiliki peran penting dalam pengembangan usaha masyarakat dengan menyediakan pembiayaan untuk mengembangkan usaha, baik yang dijalankan secara individu maupun kelompok. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat meningkat setiap tahunnya (Yudi, 2021).

Indonesia mempunyai potensi perekonomian nasional yang kuat karena beberapa faktor antara lain banyaknya jumlah UMKM, Indonesia mempunyai jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat besar. UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional karena banyak menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) negara. Selain itu, Kapasitas Penyerapan Tenaga Kerja, UMKM mempunyai kemampuan yang besar dalam menyerap tenaga kerja, sehingga sangat berharga untuk mengurangi pengangguran. Dengan semakin banyaknya UMKM maka akan semakin banyak pula lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, sehingga angka pengangguran dapat menurun dan UMKM dapat berkembang. Persentase UMKM yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan perkembangan dan perluasan usaha. Meningkatnya jumlah UMKM berpotensi semakin mengurangi pengangguran karena semakin banyak dunia usaha yang mampu menyerap tenaga kerja baru. Secara keseluruhan, kekuatan basis perekonomian Indonesia terletak pada banyaknya UMKM dan kemampuannya dalam menyediakan lapangan kerja, sehingga mendukung berkurangnya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kemenkeu, 2021).

UMKM mempunyai peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Jumlah dan sebaran UMKM mencakup 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia, dan menunjukkan dominasinya di sektor usaha. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 66 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia. Kontribusi terhadap PDB UMKM menyumbang 61% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara Rp 9.580 triliun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya UMKM dalam menopang perekonomian nasional. Penyedia lapangan kerja UMKM mempekerjakan sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Hal ini menjadikan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di negeri ini. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berperan dalam menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membantu mendiversifikasi perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor besar. Peran mereka dalam pembangunan ekonomi sangat penting, terutama dalam menciptakan keseimbangan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (KADIN, 2024)

Data UMKM 2018-2023						
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0,70%	1,52%

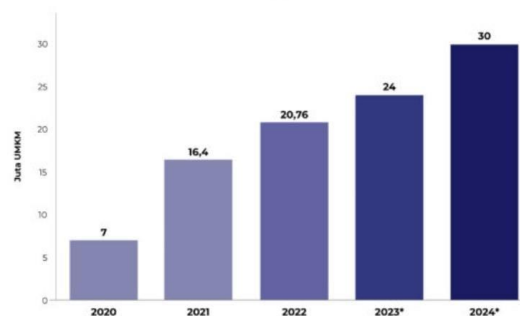
*Diolah dari berbagai sumber

Gambar 1.1
Data UMKM di Indonesia Tahun 2018-2023
(Sumber: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN))

Kategori UMKM didasarkan pada besaran modal usaha saat pendirian. Usaha dengan modal usaha maksimal satu miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dikategorikan sebagai Usaha Mikro. Usaha dengan modal usaha lebih dari satu miliar rupiah hingga lima miliar rupiah diklasifikasikan sebagai Usaha Kecil. Usaha dengan modal usaha lebih dari lima miliar rupiah hingga sepuluh miliar rupiah

termasuk dalam kategori Usaha Menengah. Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari sepuluh miliar rupiah dikategorikan sebagai Usaha Besar.

Kadin Indonesia dan Pemerintah sedang fokus meningkatkan kinerja UMKM melalui strategi digitalisasi untuk meningkatkan daya saing dan menjadikan UMKM sebagai pemain global yang berorientasi ekspor. Pemerintah dan Kadin mendorong UMKM beralih ke ekosistem digital untuk operasional sehari-hari, pemasaran, dan penjualan, serta integrasi ke dalam platform e-commerce. Dengan memasuki pasar digital, UMKM dapat meningkatkan efisiensi, menjangkau pasar yang lebih luas, dan bersaing lebih efektif secara global. Pemerintah menargetkan 24 juta UMKM masuk pasar digital pada 2023 dan 30 juta pada 2024. Berbagai inisiatif seperti WikiEntrepreneurship diluncurkan untuk memberikan informasi dan fasilitas bagi UMKM, serta dukungan dan layanan untuk mempermudah digitalisasi. Digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja UMKM tetapi juga membuka peluang ekspor baru dan penetrasi pasar global. Melalui upaya ini, UMKM Indonesia diharapkan menjadi lebih kompetitif, terhubung secara global, dan siap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 1.2

**Jumlah UMKM yang Masuk
ke Ekosistem Digital di Indonesia (2020-2024)**

(Sumber: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN))

Untuk mencapai target tersebut, Kadin mendukung program pemerintah untuk memulai transformasi digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah nyata adalah melalui berbagai program, termasuk pengembangan platform Wikiwirausaha. Platform ini sejalan dengan upaya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) membuka pusat layanan usaha terpadu. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memudahkan UMKM mengakses informasi, pelatihan, dan dukungan teknis terkait digitalisasi. Dengan adanya platform Wikiwirausaha dan pusat layanan bisnis terintegrasi, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengadopsi teknologi digital, memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Meski UMKM di Indonesia terus berkembang pesat dan menunjukkan tren positif, mereka masih menghadapi berbagai masalah kompleks dalam pengelolaan usaha (Utami, 2018). Menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tahun 2020, sekitar 46,6 juta dari 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan baik dari bank maupun lembaga keuangan non-bank. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mulai 19 Januari 2022, skema KUR terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus. Khusus untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro, tidak diperlukan jaminan tambahan.

Menurut Anggraini & Nasution (2016), semakin besar modal KUR yang diperoleh UMKM, semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan UMKM. Sebaliknya, penelitian oleh Lastina & Budhi (2018) menunjukkan bahwa semakin baik modal pinjaman KUR yang diterima UMKM, maka pendapatan UMKM juga akan meningkat.

Menurut data Dinkop Jawa Tengah (Dinkop Jateng, 2024), perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan yang signifikan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 jumlah UMKM binaan mencapai 191.689 UMKM. Rinciannya UKM produksi/non pertanian sebanyak 74.203, UKM Pertanian 28.520, UKM perdagangan 67.210 dan UKM Jasa 21.756. Perkembangan UMKM di Provinsi

Jawa Tengah juga mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap perekonomian daerah. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa Tengah menunjukkan tren yang semakin positif dari tahun ke tahun, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam memperkuat perekonomian daerah. Pada tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB Jawa Tengah tercatat sebesar 12,45%. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran UMKM dalam pemenuhan nilai tambah perekonomian di provinsi tersebut. Pada tahun berikutnya yakni 2022, kontribusi UMKM sedikit meningkat menjadi 12,46%. Meski kenaikannya terbilang kecil, namun hal ini masih menjadi indikasi bahwa sektor UMKM tetap memberikan kontribusi yang stabil. Menariknya lagi, pada tahun 2023 kontribusi UMKM meningkat drastis hingga mencapai 14,89%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, namun juga semakin berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kontribusi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan produktivitas UMKM, dukungan kebijakan yang lebih baik dari pemerintah, serta perkembangan pasar dan akses sumber daya yang lebih baik.

Pentingnya pengembangan UMKM tidak bisa dianggap remeh. Pengembangan tersebut mencakup berbagai aspek seperti pelatihan manajerial, akses permodalan, bantuan pemasaran, dan pengembangan kapasitas produksi. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Misalnya, program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pengusaha UMKM, memberikan akses terhadap teknologi baru, dan memperluas jaringan pemasaran dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM. Selain itu, dukungan pemerintah dan lembaga terkait berupa regulasi yang mendukung, insentif perpajakan, dan kemudahan administrasi juga turut berkontribusi terhadap keberhasilan UMKM. Secara keseluruhan, pengembangan UMKM di Jawa Tengah tidak hanya penting untuk meningkatkan kontribusi PDB, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh provinsi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes (BPS Kabupaten Brebes, 2023), jumlah UMKM di Kabupaten Brebes menunjukkan peningkatan yang signifikan. Per 1 Januari 2023, tercatat ada 60.022 UMKM. Peningkatan ini merupakan indikator positif yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja usaha mereka agar tetap bertahan dan tidak kalah dengan usaha-usaha baru yang bermunculan. UMKM diharapkan dapat naik kelas, tetapi dalam praktiknya masih banyak usaha mikro dan kecil yang kesulitan untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar (Meisari, 2018).

UMKM masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan, kendala administratif, legalitas badan usaha, serta prosedur perizinan yang belum terselesaikan. Selain itu, UMKM sering kesulitan mendapatkan bahan baku berkualitas (Sarwono, 2015), mengidentifikasi dan mendefinisikan industri halal, serta menghadapi masalah keterampilan SDM dan informasi. Kondisi pandemi Covid-19 juga membawa masalah tambahan, termasuk perubahan perilaku konsumen, yang menghambat daya saing UMKM.

Jika dilihat dari sumber pembiayaan, UMKM masih sangat bergantung pada modal sendiri (71%), dengan hanya 16% yang memperoleh akses dari perbankan dan 13% dari sumber lain (KNEKS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan bagi UMKM masih sangat terbatas, mengindikasikan masalah inklusi keuangan. Menurut Bank Dunia (2008), inklusi keuangan adalah upaya komprehensif untuk menghilangkan hambatan terhadap akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki akses modal yang mudah guna mengembangkan kegiatan ekonomi mereka.

Para pengusaha UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal dan mencari cara cepat untuk mendapatkannya, salah satunya dengan meminjam dari rentenir. Situasi ini menyebabkan berbagai masalah seperti tingginya bunga, ketidakmampuan menunda pelunasan, dan kesulitan dalam membayar kembali

pinjaman saat jatuh tempo. Akibatnya, penambahan utang berdampak negatif pada produktivitas dan pendapatan (Mongkito dkk., 2021).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pembiayaan kredit melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dukungan ini sangat penting karena diharapkan dapat menumbuhkan pelaku usaha baru dan meningkatkan daya saing UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas ke skala usaha yang lebih besar (Kementerian Keuangan, 2019). Selain itu, sektor UMKM menjadi prioritas dalam penyaluran dana perbankan, sejalan dengan program pemerintah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan UMKM (Silalahi, 2022).

Program Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif penting perbankan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi UMKM. Pembiayaan KUR berperan besar dalam memperkuat perekonomian Indonesia di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan lainnya (Mirnawati dkk., 2020). Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan jasa keuangan formal melalui program KUR yang diluncurkan pada November 2007. Untuk mempercepat perkembangan UMKM, sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan KUR lebih pro-rakyat, termasuk menurunkan suku bunga dari tujuh persen menjadi enam persen.

Pada tahun 2021, pemerintah menyalurkan program KUR dengan bekerja sama dengan berbagai penyalur KUR, termasuk bank BUMN, bank umum swasta, bank pembangunan daerah, perusahaan pembiayaan, dan koperasi simpan pinjam. Program KUR juga didukung oleh 10 lembaga penjaminan kredit untuk memastikan pengelolaan dan penyaluran yang baik. Pemerintah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengawasi pelaksanaan dan jaminan KUR (KEMENKO, 2020).

Sebagai lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat, bank berperan besar dalam membantu pemerintah memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk kredit yang mereka tawarkan. Perbankan syariah turut memberikan dukungan dengan menyediakan produk pembiayaan bagi UMKM, seperti produk KUR BSI, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal atau investasi. Pembiayaan ini dapat memberikan pengusaha mikro tambahan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memajukan usahanya.

Perkembangan usaha akan tercermin dalam kinerja UMKM yang dihasilkan. Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Wahyudiati & Isroah, 2018). Pelaku UMKM perlu fokus pada kinerja usaha mereka agar dapat berkembang dan memiliki keunggulan bersaing (Suindari & Juniariani, 2020). Dengan kinerja yang optimal, UMKM diharapkan dapat semakin kokoh menjadi sektor tulang punggung perekonomian.

Menurut Titin (2020), efektivitas penyaluran KUR dapat dinilai melalui lima aspek utama: ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah uang yang diterima nasabah, ketepatan biaya kredit, dan ketepatan prosedur. Pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia telah menunjukkan efektivitas, di mana penyalurannya kini difokuskan pada sektor perdagangan dan sektor produktif, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa produk KUR BSI yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia, khususnya di BSI KCP Brebes Bumiayu, diharapkan dapat membantu mengatasi kendala permodalan. Modal yang diperoleh dari KUR ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Pinjaman KUR yang ditawarkan oleh BSI menjadi alternatif bagi pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan berbasis syariah, yang insya Allah bebas dari riba.

Penelitian tentang Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun terdapat beberapa perbedaan pada penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Riska Widiati

(2015) yang meneliti tentang Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Memberdayakan UKM di Desa Banyusari, Kecamatan Malausma (Studi Kasus pada BRI Unit Malausma). Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu BRI Unit Malausma dan lokasi nasabah KUR BRI Unit Malausma. Penelitian serupa dilakukan oleh Dinda Fadhillah (2017) tentang Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Bagi Perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Medan Selayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyaluran KUR di Kecamatan Medan Selayang dan bagaimana KUR BRI berperan dalam perkembangan usaha mikro di daerah tersebut.

Kemudian yang membedakan penelitian kali ini dengan yang sebelumnya adalah dimana penelitian kali ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan penelitian ini membahas tentang efektivitas dari penyaluran KUR terhadap pengembangan UMKM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi mengenai penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia, di antaranya:

1. Banyak UMKM yang kesulitan memperoleh modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Selain keterbatasan modal, UMKM juga sering mengalami kendala dalam memperoleh tambahan pembiayaan.
2. Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat operasional UMKM.
3. Banyak UMKM belum menyelesaikan proses legalitas seperti pendaftaran badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi secara sah.
4. UMKM sering mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku yang berkualitas dan dengan harga yang wajar (terjangkau).

5. Dalam konteks industri halal, UMKM mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan standar halal yang tepat, serta memperoleh sertifikasi halal yang diperlukan.
6. Keterbatasan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. UMKM mungkin tidak memiliki keahlian yang memadai dalam bidang manajemen, pemasaran atau produksi.
7. Kurangnya akses terhadap informasi yang relevan, baik mengenai pasar maupun teknologi, dapat menghambat kemampuan UMKM dalam mengambil keputusan dan berkembang.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dituliskan pada bagian identifikasi masalah, penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu memfokuskan permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM di Kecamatan Bumiayu dalam memperoleh permodalan. Penelitian ini akan membatasi kajian pada aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi akses UMKM terhadap permodalan, seperti kebijakan perbankan, prosedur pengajuan kredit, dan persyaratan jaminan yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan internal UMKM, seperti keterbatasan administratif dan kurangnya pengetahuan mengenai opsi pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSI KCP Brebes Bumiayu terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiayu?
2. Apa saja hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSI KCP Brebes Bumiayu terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiayu dan Langkah apa saja yang diambil oleh BSI KCP Brebes Bumiayu untuk mengatasi hambatan tersebut?

3. Apa saja peningkatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSI KCP Brebes Bumiayu terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiayu?
4. Bagaimana efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSI KCP Brebes Bumiayu terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiayu?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiayu
2. Untuk menganalisis hambatan apa saja dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSI KCP Brebes Bumiayu terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiayu dan Solusi apa apa saja yang diambil oleh BSI KCP Brebes Bumiayu untuk mengatasi hambatan tersebut.
3. Untuk Menganalisis peningkatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSI KCP Brebes Bumiayu terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiayu.
4. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiayu.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmiah dalam bidang pembiayaan khususnya mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta menjadi acuan/referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan kajian terkait.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dan menambah pengetahuan tentang efektivitas penyaluran KUR BSI dan pengaruh KUR BSI terhadap usaha nasabah.

- b. Bank, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian pendahuluan atau bahan evaluasi untuk melakukan analisis terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan nasabah pengguna KUR di BSI. Masyarakat, penelitian ini secara tidak langsung memberikan informasi atau ulasan dari nasabah yang pernah menggunakan KUR BSI, agar masyarakat lebih tahu, lebih paham dan tidak ada keraguan untuk menggunakan KUR di BSI.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Sugianto (2016), tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk mengeksplorasi makna, menganalisis proses, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam serta komprehensif tentang individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian di BSI KCP Brebes Bumiayu.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan benda-benda alam (objek Ilmiah) dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau kemanusiaan dengan menghasilkan gambaran yang lebih luas dan kompleks, yang kemudian dapat dikomunikasikan dan dilaporkan secara rinci. Dengan kata lain penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya), maka penelitian ini akan mendeskripsikan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan

mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di BSI KCP Brebes Bumiayu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan di Bank Syariah Indonesia KCP Brebes Bumiayu, Dukuhtengah, Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52273. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 4 bulan selama saya melaksanakan magang dan dilanjutkan 3 bulan pada bulan Oktober s.d. Desember untuk penelitian lebih mendalam di BSI KCP Brebes Bumiayu.

3. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan informan bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Menurut Dana P. Turner (2020), purposive sampling adalah metode pemilihan sampel di mana peneliti memilih individu yang sudah ditargetkan karena memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian. Berikut besaran informasi sampel dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Staf Mikro BSI KCP Brebes Bumiayu Bapak Husni Amri
- 2) Branch Manager BSI KCP Brebes Bumiayu Bapak Setyo Bayu Aji
- 3) Nasabah penerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BSI KCP Brebes Bumiayu

4. Sumber dan Teknik/Metode Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain melalui membaca, mempelajari, dan memahami literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini mencakup jurnal, buku, data, internet, serta observasi langsung di BSI KCP Brebes Bumiayu. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian tentang efektivitas penyaluran KUR terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Bumiayu meliputi:

- 1) Data nasabah penerima pembiayaan KUR selama lima tahun terakhir (2019-2023) di BSI KCP Brebes Bumiayu.
- 2) Struktur organisasi di BSI KCP Brebes Bumiayu.
- 3) Dokumen pendukung lainnya.

b. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari lapangan, seperti wawancara dan observasi di BSI KCP Brebes Bumiayu. Data ini berasal dari karyawan dan nasabah yang menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Karyawan dengan pengalaman kerja minimal satu tahun di BSI KCP Brebes Bumiayu.
- 2) Karyawan yang paham betul tentang penyaluran KUR di BSI KCP Brebes Bumiayu.
- 3) Karyawan yang sering berinteraksi langsung dengan nasabah, terutama nasabah KUR di Kecamatan Bumiayu.
- 4) Nasabah yang menerima pembiayaan KUR di BSI KCP Brebes Bumiayu.

2) Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian (Sugiyono, 2018). Selama empat bulan magang di BSI KCP Brebes Bumiayu, saya melakukan penelitian dengan metode observasi yang mendalam. Setiap hari, saya memantau perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Bumiayu. Dalam pengamatan saya, saya mencatat berbagai fenomena yang terjadi, seperti nasabah yang membutuhkan modal usaha dan memilih untuk memanfaatkan KUR sebagai solusi keuangan mereka. Saya juga mengamati

berbagai masalah yang dihadapi oleh nasabah, seperti kesulitan dalam memenuhi persyaratan KUR atau tantangan dalam pengelolaan dana yang diperoleh.

Selain itu, saya memperhatikan bagaimana pihak bank memberikan pelayanan dan solusi kepada nasabah yang mengalami kesulitan. Pengalaman ini memberikan saya wawasan yang lebih dalam tentang dinamika KUR di lapangan dan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Observasi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan saya tentang KUR, tetapi juga meningkatkan minat saya untuk meneliti lebih lanjut tentang peran KUR dalam mendukung usaha kecil dan menengah di daerah Bumiayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber yang memiliki relevansi atau hubungan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bumiayu melalui penggunaan teknik wawancara terstruktur. Teknik ini melibatkan wawancara dengan pedoman yang telah disusun secara tertulis, bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber yang relevan.

Wawancara dilakukan terhadap sepuluh narasumber yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Dua di antaranya berasal dari pihak bank, yaitu Branch Manager dan Microstaff, yang diwawancarai secara terbuka di BSI KCP Brebes Bumiayu. Wawancara dengan pihak eksternal mencakup nasabah pengguna KUR BSI, yakni delapan pelaku usaha UMKM di sekitar Kecamatan Bumiayu. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyaluran KUR dan dampaknya terhadap pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

Wawancara dilaksanakan dalam tiga sesi. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 26 November 2024, dengan dua narasumber dari pihak bank, yaitu seorang staf mikro dan seorang manajer cabang. Dalam sesi ini, wawancara berfokus pada analisis mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran tersebut, langkah-langkah yang diambil bank untuk mengatasi hambatan tersebut, serta keefektifan KUR bagi nasabah yang menerimanya.

Sesi kedua wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2024 melibatkan lima narasumber yang semuanya merupakan nasabah KUR BSI KCP Brebes Bumiayu. Dalam sesi ini, wawancara berfokus pada perubahan yang dialami oleh nasabah setelah menerima KUR serta peningkatan yang dirasakan oleh nasabah dalam aspek-aspek tertentu setelah mendapatkan kredit tersebut.

Dan sesi ketiga dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025 wawancara melibatkan tiga narasumber yang semuanya sama masih merupakan nasabah KUR BSI KCP Brebes Bumiayu. Dalam sesi ini juga, wawancara berfokus pada perubahan yang dialami oleh nasabah setelah menerima KUR serta peningkatan yang dirasakan oleh nasabah dalam aspek-aspek setelah mendapatkan kredit tersebut.

Dari ketiga sesi wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penyaluran KUR oleh BSI KCP Brebes Bumiayu, tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut, serta dampak positif KUR bagi para nasabah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang terkait dengan variabel tertentu, meliputi berbagai sumber seperti buku, catatan, jurnal, surat kabar, dokumen, majalah, notulen, agenda, dan sumber lainnya. Teknik ini bertujuan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara

dan observasi yang dilakukan di BSI KCP Brebes Bumiayu. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengarsipkan berbagai kegiatan penelitian, mencakup proses dan hasil penelitian, melalui pengambilan foto dan dokumentasi lain yang mencakup sejarah, visi dan misi, tugas dan wewenang, struktur organisasi, data perolehan nasabah, serta dokumentasi wawancara.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

1) Uji *Credibility*

Untuk memastikan kepercayaan terhadap data dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan melibatkan proses observasi ulang, di mana pengamatan dan wawancara dilakukan kembali dengan narasumber yang sudah ditemui maupun yang baru. Metode ini bertujuan untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan, guna menentukan keabsahan data tersebut (Sugiyono, 2016).

Dalam konteks penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan menambah durasi observasi di BSI KCP Brebes Bumiayu selama satu bulan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data yang diperoleh lebih relevan dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah metode untuk memeriksa validitas data dengan menggunakan sumber atau metode lain sebagai alat ukur untuk mengecek dan membandingkan data tersebut. Berikut adalah teknik triangulasi data yang diterapkan dalam penelitian ini:

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan lebih dari tiga narasumber untuk mendapatkan data yang lebih

akurat, yaitu *Branch Manager*, *Microstaff*, dan delapan nasabah pengguna KUR BSI KCP Brebes Bumiayu.

- b. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari sumber yang sama tetapi menggunakan metode yang berbeda, seperti observasi dan dokumentasi pada penyaluran KUR BSI KCP Brebes Bumiayu.
- c. Triangulasi waktu dilakukan dengan memverifikasi data yang sama menggunakan teknik dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, Efektivitas Penyaluran KUR BSI pada Pengembangan UMKM di Kecamatan Bumiayu diuji dalam tiga sesi. Sesi pertama berlangsung pada waktu peneliti melaksanakan magang selama 4 bulan, dengan kegiatan pengamatan dan persetujuan penelitian. Sesi kedua pada bulan oktober s.d. Desember 2024 melibatkan wawancara dengan pihak bank dan nasabah. Sesi terakhir dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp.

6. Teknik Analisis Data

1) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses penelitian di BSI KCP Brebes Bumiayu. Berdasarkan pandangan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018), tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif ini mengikuti model interaktif, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses memperoleh informasi secara langsung dari narasumber, serta melalui dokumen atau arsip yang relevan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan tiga teknik: wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan langsung di BSI KCP Brebes Bumiayu.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan menyaring informasi untuk memastikan hanya data yang relevan dengan tujuan penelitian yang dipertahankan. Langkah ini membantu memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan dengan merangkum data terkait Penyaluran KUR BSI di BSI KCP Brebes Bumiayu yang relevan dengan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menampilkan data dengan cara ini memudahkan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan membantu merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang sudah dipahami.

d. Kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil analisis data, termasuk wawancara dan dokumentasi yang telah melalui proses reduksi dan penyajian. Tahap ini membantu peneliti menghasilkan kesimpulan yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga dapat mendukung pemahaman yang lebih mendalam terkait hasil penelitian.

2) Pengukuran Efektivitas

Menurut Duncan (1973) yang dikutip oleh Ulfa (2022), teknik analisis data dalam penelitian efektivitas penyaluran KUR menggunakan penyusunan data berdasarkan indikator tertentu sebagai tolok ukur. Indikator dalam penelitian ini mencakup:

a. Pemahaman

Pemahaman mengacu pada kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan, menerjemahkan, atau mengartikulasikan informasi yang diketahui, telah dilakukan, atau dipelajari. Pemahaman program mengukur sejauh mana masyarakat memahami kegiatan tertentu yang

dilakukan di BSI KCP Brebes Bumiayu. Karyawan dan nasabah harus mampu memahami produk KUR BSI melalui penyaluran KUR yang efektif.

b. Tepat Sasaran

Tepat sasaran menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan atau tindakan sesuai dengan tujuannya. Untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam menarik nasabah yang tepat Hal ini bertujuan memastikan bahwa inisiatif penyaluran KUR benar-benar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kemungkinan menarik nasabah yang tepat untuk program KUR.

c. Tepat Waktu

Tepat waktu mengevaluasi apakah waktu yang dihabiskan sesuai dengan aktivitas atau tugas yang dijadwalkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Ini melibatkan penilaian efektivitas BSI KCP Brebes Bumiayu mempromosikan produk KUR BSI, memastikan semua inisiatif penyaluran KUR dilaksanakan sesuai sasaran. Evaluasi ini membantu menjaga agar rencana penyaluran tetap efektif dan konsisten

d. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan diukur berdasarkan seberapa baik perusahaan memenuhi tujuan dari setiap kegiatannya atau tujuan utama perusahaan secara keseluruhan. Dalam konteks rencana penyaluran KUR BSI, peningkatan jumlah nasabah KUR BSI merupakan indikator utama keberhasilan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas inisiatif penyaluran dalam meningkatkan jumlah nasabah program KUR BSI, sehingga tujuan utama perusahaan tercapai.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata menggambarkan tingkat perubahan yang dialami individu yang terlibat dalam kegiatan serta sejauh mana tindakan atau kegiatan tersebut memiliki pengaruh. Dalam penelitian ini, peningkatan

usaha UMKM menunjukkan perubahan pada setiap periodenya, yang didukung oleh data hasil wawancara.

Menurut Robert Kaplan dan David Norton (1992), penggunaan indikator pengukuran efektivitas memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah penerapan program atau kegiatan oleh perusahaan dapat dianggap efektif. Tingkat efektivitas ini diukur dengan membandingkan jumlah realisasi yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Indikator}} \times 100\%$$

Analisis perhitungan tingkat efektivitas didasarkan pada standar ukuran yang dikembangkan oleh Litbang Depdagri (1991) sebagaimana disebutkan dalam Hidayat (2017), yaitu:

Tabel 1.1

Kriteria Pengukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Pencapaian
Nilai $\geq 80\%$	Sangat Efektif
Nilai 60% - 79%	Efektif
Nilai 40% - 59%	Cukup Efektif
Nilai $\leq 40\%$	Sangat Tidak Efektif

Sumber: LitbangDepdagri (1991) dalam penelitian Hidayat (2017)

Tabel 2.1 tentang penilaian efektivitas menyajikan metode perhitungan dan kriteria untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dapat dianggap efektif. Program yang diteliti dinyatakan sangat efektif jika perbandingan antara jumlah perolehan target dan jumlah skor indikator mencapai lebih dari 80%. Jika hasilnya berada pada kisaran 60-79%, strategi tersebut dianggap efektif. Namun, apabila nilai persentasenya kurang dari 40%, strategi tersebut dinyatakan sangat tidak efektif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian, penulis harus menyusun sistematika penulisan. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami, baik oleh penulis sendiri maupun oleh orang lain. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi tersebut antara lain:

BAB I Pendahuluan, Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, yaitu alasan-alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, masalah dirumuskan, tujuan penelitian ditetapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta manfaat dan kegunaan penelitian dijelaskan. Bagian ini juga mencakup penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, Bab ini berisi penjelasan umum tentang konsep efektivitas, indikator efektivitas, definisi Kredit Usaha Rakyat (KUR), tujuan KUR, definisi usaha mikro, kriteria usaha mikro, dan ciri-ciri usaha mikro.

BAB III Gambaran Objek Penelitian, Bab ini memaparkan informasi mengenai BSI KCP Brebes Bumiayu, termasuk sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI), visi dan misi BSI, produk dan operasional BSI, serta struktur organisasi BSI KCP Brebes Bumiayu.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bagian ini menjelaskan mekanisme, hambatan dan solusi dalam penyaluran KUR, efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSI terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.

BAB V Kesimpulan, Bab ini menyimpulkan efektivitas penyaluran KUR terhadap perkembangan usaha mikro di Kecamatan Bumiayu, serta memberikan saran-saran konstruktif terkait masalah yang ditemukan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan peneliti lainnya untuk perbaikan lebih lanjut.